

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai factor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan telah banyak dilakukan. Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2020) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan profitabilitas, yang diukur dengan *return on equity*, leverage yang diukur dengan *debt to equity* dan *good corporate governance* yang diukur dengan (Kepemilikan manajerial) terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan *price book value*. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur sektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018 menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis menyimpulkan bahwa semua variabel independen yang diteliti berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Setiawan (2019) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, profitabilitas *good corporate governance*, terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019. Sampel yang digunakan yaitu 80 laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2019 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan analisis regresi berganda menggunakan alat SPSS versi 25. Hasil analisis menyimpulkan bahwa likuiditas dan *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai

perusahaan sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan dan simultan terhadap nilai perusahaan.

Asyik (2020) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh *good governance* yang diproksi dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan yang diproksi *Price Book Value* (PBV) dengan profitabilitas diproksi *Retrun On Assets* (ROA) sebagai variabel intervening. Sampel yang digunakan yaitu 80 perusahaan sektor *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015 – 2018 dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*) dengan alat bantu aplikasi SPSS Versi 22. Hasil analisis menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit independen memiliki arah hubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, serta profitabilitas sebagai variabel intervening mampu memediasi pengaruh langsung variabel dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan komang (2020) yang menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017. Sampel yang digunakan yaitu 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017 dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan analisis yang

digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil analisis menyimpulkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, artinya semakin besar penghindaran pajak mengakibatkan penurunan nilai perusahaan dan *good corporate governance* tidak mampu memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yusmaniarti (2019) yang menguji pengaruh *good corporate governance* yang diproksi dewan komisaris independen dan komite audit, profitabilitas dan *leverage* terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018). Sampel yang digunakan yaitu 20 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018 dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 16.0. Hasil analisis menyimpulkan bahwa komite audit, komisaris independen dan *leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*agency theory*) menurut (Supriyono, 2018: 120) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agent. Teori Keagenan menjelaskan bagaimana cara terbaik untuk mengatur hubungan di mana principal yang menentukan pekerjaan sementara agent melakukan pekerjaan (Andini, 2020).

Hubungan keagenan merupakan kontrak, baik bersifat eksplisit maupun implisit, dimana satu atau lebih orang (prinsipal) meminta orang lain (agen) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal. Dalam kontrak tersebut terdapat pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Pihak manajemen diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang terkait dengan operasi dan strategi perusahaan dengan harapan keputusan-keputusan yang diambil akan memaksimalkan nilai perusahaan. Namun dalam praktiknya masih banyak keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak manajemen yang lebih menguntungkan pihak manajemen daripada pihak pemilik perusahaan (Arifin, 2017).

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya antara *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan (*agent conflict*). Adanya konflik kepentingan antara investor dan manajer menyebabkan munculnya *agency cost* yaitu biaya monitoring (*monitoring cost*) yang dikeluarkan oleh principal (Munawaroh, 2014).

2.2.2 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah nilai yang mencerminkan berapa harga yang bersedia dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Zamzami, 2018). Setiap perusahaan memiliki tujuan jangka panjang yaitu untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Wahyudi, U., 2018). Hal ini dikarenakan meningkatnya nilai sebuah perusahaan akan menunjukkan kesejahteraan dari pemilik perusahaan tersebut, sehingga pemilik

perusahaan akan berusaha mendorong manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kemakmuran pemegang saham akan meningkat jika harga saham perusahaan juga meningkat, karena nilai perusahaan dilihat dari harga pasar sahamnya, sehingga semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham (F. R. Sari, 2010). Bagi perusahaan yang telah go public maka nilai pasar perusahaan ditentukan dari mekanisme permintaan dan penawaran di bursa efek, yang tercermin dalam listing price (Laksitaputri, 2012: 17).

Dalam penelitian ini metode dan teknik yang digunakan adalah dengan *Price Book Value* (PBV). PBV adalah perbandingan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Dimana nilai buku perusahaan (book value share) adalah perbandingan antara ekuitas saham biasa dengan jumlah saham yang beredar (Wijaya, 2015).

2.2.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Kartika, 2017). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat meminimalisir beban perusahaan, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan (Apsari, 2018).

Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP (Surat Ketetapan Pajak) keluar. Dalam Penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-

undang sekalipun kadang dengan jelas menafsirkan Undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang tersebut (Sari, 2013: 51).

Menurut (Maryam, 2021) terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan, yaitu:

1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan karena data pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT PPh) sulit diperoleh di lapangan karena hal tersebut adalah bersifat rahasia. Namun, ada banyak cara yang bisa digunakan untuk mengukur adanya praktik penghindaran pajak. Pada umumnya proksi pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data yang berasal dari laporan keuangan karena pengembalian pajak tidak di publikasikan dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas (Fatimah, 2018). Dalam penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga dapat membayar beban pajak yang lebih rendah, perbuatan ini secara harfiah tidak melanggar undang-undang perpajakan, tapi dari segi jiwa undang-undang perpajakan, ini termasuk perbuatan melanggar (Maryam, 2021).

Menurut (Stevanus, 2015) adapun beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu sebagai berikut:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dan modal sehingga dapat mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan dibebankan terhadap laba bersih, sehingga dapat mengurangi utang pajak.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis untuk pengurang laba bersih.
4. Membebankan depresiasi/penyusutan yang berlebihan untuk mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku didalam industry manufaktur untuk mengurangi laba kena pajak.
6. Mengalihkan sebagian laba ke anak perusahaan yang beroperasi di Negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

2.2.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu (Zamzami, 2018). Menurut (Puspitaningtyas, 2017) tingkat profitabilitas menjadi penting bagi upaya pencapaian tujuan perusahaan. Suatu perusahaan harus berada dalam kondisi yang menguntungkan (*profitable*), sebab tanpa keuntungan (*profit*), maka akan sulit bagi perusahaan menarik minat investor untuk menginvestasikan dananya dalam saham perusahaan. Oleh karenanya, upaya peningkatan profitabilitas penting artinya bagi kelangsungan dan masa depan perusahaan. Terdapat beberapa indicator pengukuran profitabilitas, diantaranya: *net profit margin*, *return on assets*, dan *return on equity*.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas (*profitability*) besar setiap tahunnya, cenderung diminati oleh banyak investor. Para investor beranggapan

bahwa perusahaan yang mempunyai profit besar akan menghasilkan return yang besar pula (Denziana, 2016). Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya . Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin (Hermuningsih, 2012: 211).

Profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yaitu pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Ukuran yang banyak digunakan adalah *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE), rasio profitabilitas diukur dengan ROA dan ROE mencerminkan daya tarik bisnis (*business attractive*) (Sabrin, 2016). *Return on assets* (ROA) adalah ukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan jumlah keseluruhan aset yang tersedia di dalam perusahaan. ROA digunakan untuk melihat tingkat efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan (Fitriyani, 2019).

2.2.5 Good Corporate Governance

Konsep tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem perusahaan yang mampu mengendalikan serta mengatur kegiatan bisnis agar dapat menambah nilai perusahaan (*value added*), sehingga perusahaan dianggap mampu menerapkan dan menunjukkan akuntabilitas, tanggung jawab, keakuratan informasi, dan transparansi (Harnovinsah et al., 2020: 135). *Good corporate governance sangat dibutuhkan* diberbagai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kinerja keuangan.

Tingginya kinerja keuangan memberikan efek kepada nilai perusahaan (Fitriyani, 2019).

Tujuan *good corporate governance* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) (Fitriyani, 2019). Dalam pedoman umum *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dinyatakan bahwa *good corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan (Solihin, 2009: 213).

Dalam pedoman buku (KNKG, 2006) dijelaskan beberapa Asas *good corporate governance* bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, GCG memiliki prinsip sebagai berikut (Solihin, 2009: 213):

1. Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil

inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate governance.

4. Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Mekanisme GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit. Dalam suatu perusahaan, dewan memegang peranan yang signifikan dalam penentuan strategi perusahaan. Kekuasaan tertinggi dalam hal operasional di perusahaan terletak pada dewan direksi. Dewan komisaris dan dewan direksi memiliki kekuasaan dan kekuatan tertinggi di dalam semua aspek organisasi, bisnis, dan sumber daya perusahaan (Djajendra, 2010). Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan sebagai salah satu elemen corporate governance yang membantu meningkatkan akuntabilitas dewan komisaris. Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang dan secara berkala melakukan review atas implementasi strategi tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan benefit yang tinggi bagi perusahaan (Apriyanti, 2016: 193). Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite audit juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Forker, 2015). Penelitian (Prastuti, 2015) mengungkapkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh pada nilai perusahaan.

1. Dewan Direksi

Board size atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi harus memastikan, bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang

diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zamzami, 2018).

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dalam dua hal yaitu untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat (Kusumaningtyas, 2015).

2. Dewan Komisaris Independen

Menurut (Ahmad, 2015: 219) komposisi komisaris dalam sistem two-tier board, dianjurkan agar didominasi para komisaris independen, sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Struktur kepemimpinan dewan yang independen pada sistem two-tier board sangat efektif untuk mengurangi agency problem karena adanya pemisahan dalam hal kebijakan bidang manajemen dengan kebijakan bidang pengawasan.

Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris tersebut. Dengan adanya komisaris independen, diharapkan para eksekutif akan bertindak untuk kepentingan pemilik (Boediono, 2015) dalam Darwis (2009). Adanya komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan

diharapkan akan direaksi positif oleh pasar (investor), karena kepentingan investor akan lebih dilindungi (Darwis, 2009).

3. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Monitoring proses laporan keuangan yang mampu menjaga kredibilitas pelaporan keuangan dapat dilakukan oleh komite audit (Bradbury, 2015), selain itu komite audit juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Forker, 2015). Penelitian Black et al. (2003) mengungkapkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh pada nilai perusahaan (Prastuti, 2015).

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Perencanaan Pajak dengan Nilai Perusahaan

Dalam perspektif teori agensi mengenai praktik penghindaran pajak, tata kelola perusahaan merupakan faktor penting dalam penilaian pengakuan penghindaran pajak. Pengaruh langsung dari penghindaran pajak adalah peningkatan nilai setelah pajak dari perusahaan. Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan tata kelola yang kurang baik akan lebih beresiko terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan manajer dan kepentingan investor. Perusahaan memiliki alasan dalam melakukan praktik penghindaran pajak yaitu untuk mengurangi hutang pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan (Maryam, 2021).

Hal tersebut tentunya merupakan pencerminan dari perilaku oportunistik manajer yang seharusnya memberikan informasi yang akurat kepada para investor.

Perusahaan akan melaporkan laba sebelum pajak yang lebih rendah agar dapat memperoleh beban pajak yang lebih rendah. Namun perilaku tersebut dapat mengurangi kandungan informasi yang disajikan dan akhirnya akan mempengaruhi keputusan investor dalam memberikan nilai kepada perusahaan (Stevanus, 2015).

2.3.2 Hubungan Profitabilitas dengan Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan return on asset (ROA). Return on asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas terhadap pemegang saham (Dewi, 2013).

Menurut (Fahmi, 2013: 223) rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fitriyani, 2019). Variabel profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini direpresentasikan dengan:

a) *Return On Asset (ROA)*

Menurut (Fitriyani, 2019), Return On Asset (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat

pendapatan, asset dan modal saham tertentu. Menurut (Harahap, 2010: 169) rasio ini menunjukkan berapa laba bersih yang diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva.

2.3.3 Hubungan *Good Corporate Governance* dengan Nilai Perusahaan

Teori keagenan menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Konflik yang potensial terjadi dikarenakan kepentingan yang berbeda diantara agen dan principal. Konflik kepentingan yang muncul disebut konflik keagenan. Pada dasarnya, konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya check and balance untuk mengurangi untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Purwaningtyas, 2011).

Secara teoritis, jika praktik good corporate governance berjalan dengan efektif dan efisien maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik yang selanjutnya dapat meningkatkan nilai perusahaan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Good corporate governance juga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang juga akan berdampak pada nilai perusahaan (Purwaningtyas, 2011).

Pelaksanaan good corporate governance yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan, bahwa dana yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik dan kepentingan investor publik

akan aman. Kepercayaan investor publik pada manajemen perusahaan memberikan manfaat kepada perusahaan dalam bentuk pengurangan cost of capital (biaya modal). Kinerja perusahaan yang baik dengan biaya modal yang rendah akan mendorong para investor melakukan investasi di perusahaan tersebut. Banyaknya investor yang tertarik akan meningkatkan permintaan investasi, sehingga harga saham perusahaan akan meningkat yang merupakan rantai pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan kemakmuran stakeholders yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (Purwaningtyas, 2011).

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Agency theory menjelaskan bahwa kepentingan agent dan principal dimungkinkan untuk bertentangan. Agent yang diberikan mandat oleh principal untuk mengelola perusahaan dalam kenyataannya seringkali menghadapi masalah karena terjadi benturan kepentingan di antara keduanya. Menurut Watts dan Zimmerman (2017), konflik kepentingan semakin meningkat karena principal tidak dapat memonitor secara langsung aktivitas agent untuk memastikan bahwa agent bekerja sesuai dengan kepentingan principal. Hal ini menyebabkan principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana kinerja agent dan kondisi perusahaan sesungguhnya. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi antara agent dan principal yang dikenal dengan istilah asimetri informasi. Dampak dari kondisi tersebut dapat berupa moral hazard yaitu permasalahan yang muncul karena agent tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Asimetri informasi yang terjadi mendorong agent

untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya dengan memanfaatkan keterbatasan informasi yang dimiliki principal melalui penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Chen et al (2016) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, artinya semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah nilai perusahaan. Menurut penelitian Putri (2015), penghindaran pajak dapat memberi kesempatan tindakan managerial opportunism dengan manipulasi laba atau penempatan sumber daya lain yang tidak sesuai. Hal tersebut mengakibatkan adanya informasi tidak benar yang menyesatkan investor karena laporan keuangan perusahaan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₁ : Penghindaran Pajak berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Teori sinyal yang menyatakan bahwa peningkatan profitabilitas yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan upaya memberikan sinyal positif kepada investor berkaitan dengan kinerja perusahaan dan pertumbuhan prospek usaha di masa mendatang (Rizqia, 2013). Upaya tersebut dapat membangun sentimen positif dari investor sehingga berdampak terhadap kenaikan harga saham di pasar modal. Peningkatan harga saham dapat meningkatkan nilai perusahaan dimata investor (Ayu, 2017). Sehingga, dapat dijelaskan bahwa nilai perusahaan dapat tercermin dari kemampuannya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin tinggi nilai perusahaan dan semakin rendah tingkat profitabilitas, semakin rendah juga nilai perusahaan. Penelitian ini memprediksikan

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Fitriyani, 2019).

Berdasarkan penelitian Monoarfa (2018), ditemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan nilai perusahaan. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin tinggi nilai perusahaan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, akan menaikkan nilai perusahaan sebagaimana diindikasikan oleh kenaikan harga saham perusahaan. Menurut Mardiyanto (2009) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak terhadap harga saham dari perusahaan tersebut sehingga nilai perusahaan akan semakin baik pula dengan adanya peningkatan ROA.

H₂ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

2.4.3 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan

Perusahaan dapat melakukan pengendalian terhadap masalah keagenan dengan cara melakukan pemilihan agen untuk dapat melakukan pengelolaan dan mengawasi seluruh kegiatan di perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, principal dapat meminimalisir terjadinya masalah keagenan dalam perusahaan dengan cara memilih dan menentukan jumlah agen yang akan mengelola perusahaan (Zamzami, 2018). Ukuran dewan direksi yang tepat akan dapat memaksimalkan kinerja

perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan (Mishra dan kapil, 2017). Namun pada kenyataannya jika terlalu banyak anggota yang mengelola perusahaan justru dapat memberikan efek yang kurang baik bagi perusahaan. Banyaknya jumlah anggota dewan direksi akan menimbulkan banyak perdebatan dan kesalahpahaman. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar ukuran dewan direksi dalam perusahaan akan semakin susah bagi seluruh anggota dewan direksi untuk mengungkapkan ide dan pendapatnya (Carolina et al., 2020).

Menurut (Fitriyani, 2019) dewan direksi dengan ukuran yang sesuai dapat memaksimalkan kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Tugas utama dewan direksi yaitu harus memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, meningkatkan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Carolina et al., 2020) menyatakan bahwa jika terlalu banyak anggota dalam pengelolaan perusahaan akan memberikan efek yang kurang baik bagi perusahaan dikarenakan dengan banyaknya anggota dapat menimbulkan perdebatan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu penulis menduga bahwa pengaruh dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

H₃ : Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan.

2.4.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Keberadaan komisaris independen juga diatur dalam ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Jakarta (BEJ) nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000. Perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki komisaris independen dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah

seluruh anggota komisaris. Outsider directors membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan review atas implementasi strategi tersebut. Dengan demikian hal ini akan memberikan benefit yang tinggi bagi perusahaan (Purwantini, 2016).

Dechow et al (2016) menyatakan bahwa independensi dari corporate board akan mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan dan mengupayakan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Adanya pengawasan yang baik akan meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen dalam pelaporan keuangan. Dengan begitu maka kualitas laporan keuangan juga semakin baik dan menyebabkan investor percaya untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut, sehingga pada umumnya harga saham perusahaan akan lebih tinggi dan nilai perusahaan semakin meningkat. Oleh karena itu penulis menduga bahwa pengaruh dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H4 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan.

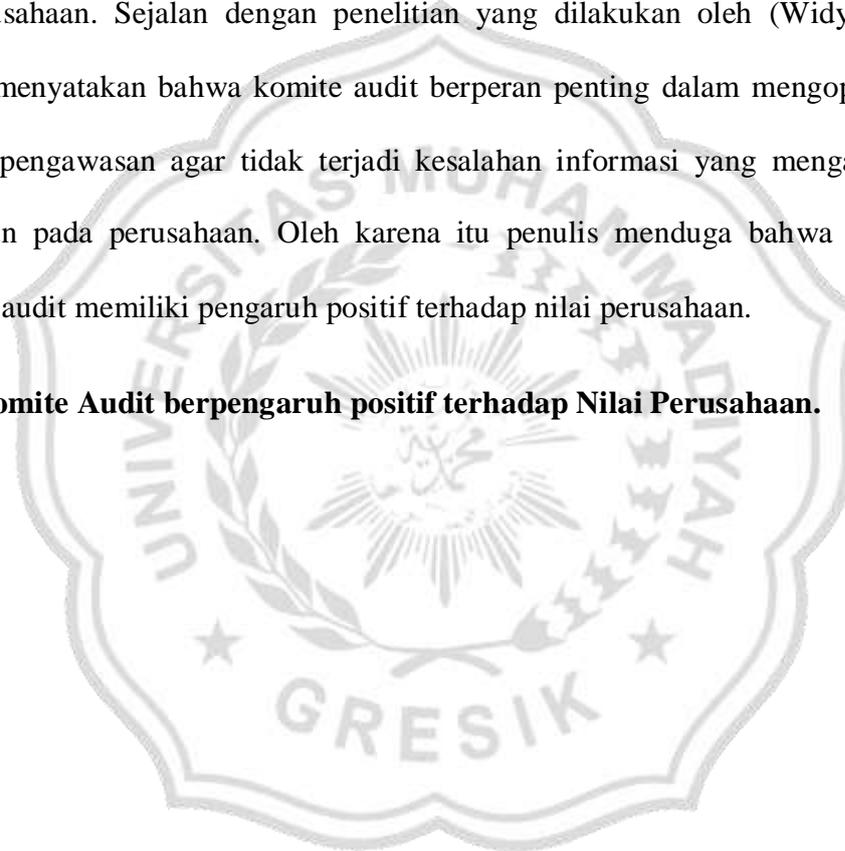
2.4.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Komite audit mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam sebuah perusahaan, cakupan dalam aspek monitoring terhadap risiko-risiko yang dihadapi perusahaan menjadi lebih baik. Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memastikan pencapaian kinerja perusahaan. Dengan adanya komite audit yang melakukan pengawasan terhadap

perusahaan akan meningkatkan apresiasi pelaku pasar sehingga meningkatkan respon pasar terhadap saham perusahaan dan meningkatkan harga pasar saham sekaligus meningkatkan nilai perusahaan (Lestari, 2017).

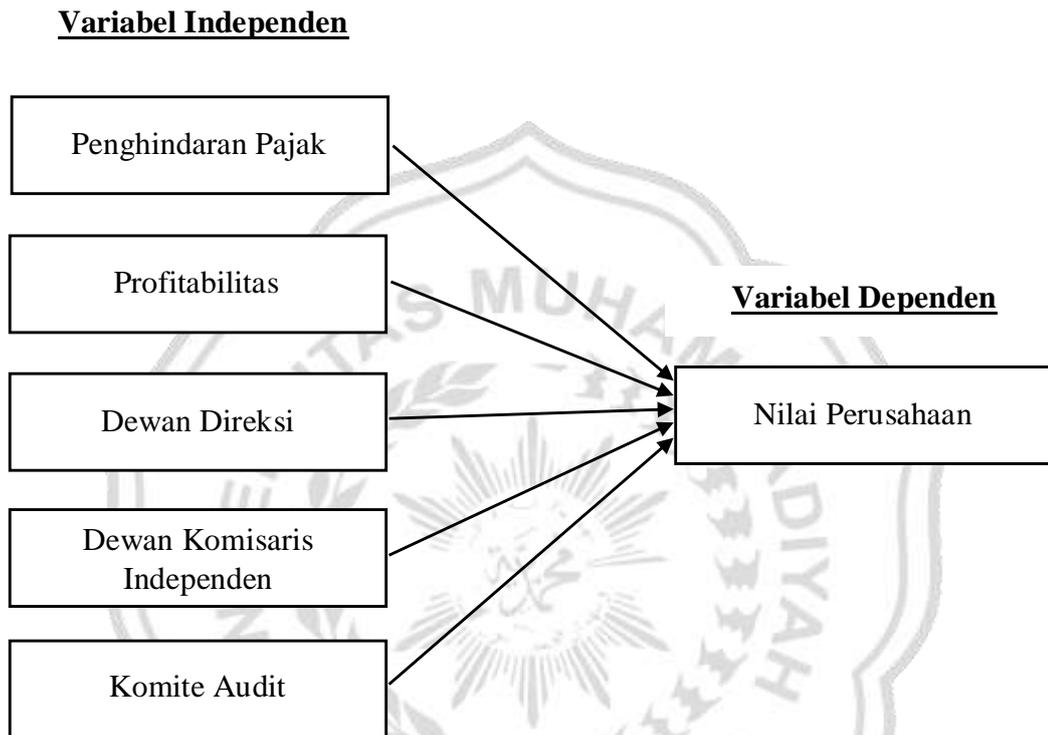
Menurut (Effendi, 2016: 251-253) pada Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) komite audit yaitu melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, auditing dan mengimplementasikan good corporate governance di perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyaningsih, 2018) menyatakan bahwa komite audit berperan penting dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan agar tidak terjadi kesalahan informasi yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu penulis menduga bahwa pengaruh komite audit memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H₅ : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.



2.5 Kerangka Konseptual

Dari berbagai penelitian yang relevan yang telah di uraikan di atas, maka peneliti menyajikan gambar kerangka pemikiran yang sesuai dengan topic yang telah dipilih sebagai berikut :



Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual